



Pengaruh Realisasi Penerimaan Dan Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Kendaraan Bermotor Sebagai Variabel Moderasi Di Bapenda Provinsi Kalimantan Utara

Rika Bulan Karolin¹, Mohammad Nur Utomo², Rini Yayuk Priyati³
rikabulankarolin1@gmail.com¹; mohnurutomo@gmail.com²; rpriyati@ecampus.ut.ac.id³
Universitas Terbuka¹; Universitas Borneo Tarakan²; Universitas Terbuka³

ABSTRACT. The aim of this research is to examine the effect of realization of PKB revenues and intensification on PAD Potential in BAPENDA of North Kalimantan Province with the Number of Motorized Vehicles as a moderating variable. The type of research used in the research is quantitative research with data in the form of annual Motor Vehicle Tax Reports taken from 5 districts/cities in North Kalimantan, from 2017 to 2021. Data analysis in this research uses Partial Least Squares (PLS)-Structural Equation Modeling (SEM). The research results found that the realization of Motor Vehicle Tax Revenue had a positive and significant effect on the Potential of Original Regional Income in BAPENDA, North Kalimantan Province. This means that the higher the realization of motor vehicle tax revenue, the potential for local revenue in BAPENDA North Kalimantan Province will increase. Intensification of Motor Vehicle Taxes has no effect on the Regional Original Income Potential in BAPENDA of North Kalimantan Province. This means that the higher or lower the level of motor vehicle tax intensification does not have a significant influence on increasing or decreasing the potential for local original income in BAPENDA of North Kalimantan Province. The number of motorized vehicles is unable to moderate the influence of actual motor vehicle tax revenue on the potential for local revenue in BAPENDA, North Kalimantan Province. This means that an increase or decrease in the number of motorized vehicles does not affect the strength or weakness of the realization of motor vehicle tax revenue on the potential for local revenue in BAPENDA of North Kalimantan Province. The number of motor vehicles is able to moderate the influence of motor vehicle tax intensification on the potential for local revenue in BAPENDA, North Kalimantan Province. This means that the increasing number of motorized vehicles can strengthen the influence of motor vehicle tax intensification on the potential for local revenue in BAPENDA, North Kalimantan Province.

Keywords: Realization of PKB Revenue, Intensification of PKB, Number of Motorized Vehicles, PAD Potential

ABSTRAK. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh realisasi penerimaan dan intensifikasi PKB terhadap Potensi PAD pada BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara dengan Jumlah Kendaraan Bermotor sebagai variabel moderasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan data berupa Laporan Pajak Kendaraan Bermotor tahunan yang diambil dari 5 kabupaten/ kota yang ada di Kalimantan Utara, dari tahun 2017 hingga 2021. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Squares (PLS)-Structural Equation Modelling (SEM)*. Hasil penelitian ditemukan realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Artinya, semakin tinggi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Artinya, semakin tinggi atau rendah tingkat intensifikasi pajak kendaraan bermotor tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan atau penurunan potensi pendapatan asli daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah Kendaraan Bermotor tidak mampu memoderasi pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Artinya, naik atau turunnya jumlah kendaraan bermotor tidak memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap potensi pendapatan asli daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Jumlah Kendaraan Bermotor mampu memoderasi pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Artinya, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mampu memperkuat pengaruh intensifikasi pajak kendaraan bermotor terhadap potensi pendapatan asli daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara.

Kata Kunci: Realisasi Penerimaan PKB, Intensifikasi PKB, Jumlah Kendaraan Bermotor, Potensi PAD

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan daerah memerlukan strategi dan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi PAD merupakan suatu nilai maksimal yang dapat diharapkan menjadi tolak ukur penetapan perencanaan penerimaan pajak daerah dalam suatu kurun waktu tertentu. Tolak ukur Potensi PAD dapat dilihat melalui realisasi penerimaan pajak yang dipungut daerah setiap tahunnya. Tercapai atau belum tercapainya target yang telah ditentukan tergantung dari realisasi penerimaan yang masuk ke kas daerah bisa terlihat apakah sudah benar-benar menggali potensi secara optimal. Jika realisasi penerimaan melebihi target yang sudah ditetapkan pemerintah daerah, maka tentu saja akan berdampak positif terhadap penerimaan daerah tersebut. Sedangkan apabila target penerimaan yang telah ditentukan tidak tercapai, maka perlu dilakukannya evaluasi agar terealisasi dan bisa mencapai atau melebihi target tersebut (Budi, dkk: 2016). Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata. Artinya realisasi penerimaan mencerminkan prestasi historis suatu jenis pendapatan yang terdapat dalam wilayah kekuasaan pemerintah daerah dan menggambarkan suatu nilai yang senyatanya telah dipungut (Mardiasmo, 2009).

Pemberian kewenangan ini makin luas pada daerah memberdayakan diri, terutama yang kaitannya dengan pengelolaan sumber pendanaan yang dimiliki daerah seperti PAD. PAD adalah semua pendapatan daerah yang bersumber dari sumber asli ekonomi daerah. Semakin tinggi peran pendapatan daerah maka semakin tinggi pula pendapatan yang diterima daerah, yang mencerminkan tingkat keberhasilan yang dicapai oleh daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rikayana dkk, 2020). Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang dapat dipungut berdasarkan aturan untuk meningkatkan PAD. Meskipun kewenangan sudah diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri untuk melaksanakan pembangunan daerah, terlihat dari Realisasi PAD Provinsi Kalimantan Utara bersumber dari Pajak Daerah pada Pajak Pemerintah Provinsi tercatat masih belum terlihat secara signifikan peningkatannya.

Salah satu sumber untuk peningkatan PAD yaitu dari pendapatan pajak daerah tersebut. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak daerah berasal dari pajak daerah pemerintah provinsi dan pajak daerah pemerintah kabupaten/ kota. Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak provinsi yang diatur dalam Undang-undang No 28 Tahun 2009 dimana memiliki arti yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Pemerintah daerah perlu mencari cara bagaimana agar pemerintah daerah bisa menggali Potensi PAD nya melalui PKB. Terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu untuk PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan (Anjani, 2014). PKB merupakan salah satu pajak lokal yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia dalam pembiayaan regional pengembangan (Dharma, 2014). Jadi PKB memiliki potensi menjadi pendapatan utama PAD yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan daerah.

Untuk target PKB, penentuan dan peningkatan target setiap tahunnya dilakukan seiring meningkatnya jumlah dan kendaraan bermotor yang ada. Dan yang paling banyak berkontribusi terhadap PKB yaitu Sepeda Motor dan Mobil Penumpang. Jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami kenaikan. Melalui data dari Bapenda Provinsi Kalimantan Utara tahun 2021. Untuk mendapatkan realisasi penerimaan yang optimal perlunya pemerintah daerah menetapkan serangkaian kegiatan dalam memecahkan beberapa masalah pajak daerah. Salah satunya yaitu dengan kegiatan intensifikasi dari pemungutan pajak daerah, kegiatan ini akan menjadi potensi yang akan mendongkrak realisasi penerimaan pajak. Pengoptimalan kegiatan pemungutan pajak daerah ini dikatakan sangat dominan dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah, pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Intensifikasi dilakukan untuk meningkatkan pendapatan melalui optimalisasi pendapatan daerah dalam hal ini terhadap objek pajak atau pun subjek pajak yang sudah tercatat. Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan untuk meneliti pengaruh pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh dilakukan Oktari Dkk (2013) didapatkan bahwa pajak kendaraan bermotor dan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Haryanti dan Aji Wijaya (2019), bahwa akses pajak, fasilitas, *complaint center*, dan *website* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Januarti Panjaitan dan Parulian Simarmata (2017) bahwa secara parsial Pajak Kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap pendapatan pajak daerah. Menurut hasil penelitian Kardevi Rakatitha (2017), bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliah Dkk (2019), bahwa pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut hasil penelitian Widhiyanti (2018), bahwa pajak kendaraan bermotor menunjukkan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hal yang sama ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Tyas Pambudi Raharjo, Licke Biattant (2018) bahwa pengetahuan formal wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Diah Elvina (2017) menunjukkan bahwa pajak kendaraan bermotor berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sari Bulan Tambunan (2016) didapatkan hasil bahwa pajak kendaraan bermotor berkontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Ratna Natalia (2017) menunjukkan bahwa jenis-jenis kendaraan secara stimulan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB, didapatkan hasil uji statistik secara parsial, sepeda motor dan mobil penumpang berpengaruh positif dan signifikan, mobil barang positif namun tidak signifikan, sedangkan mobil bus berpengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan dari beberapa peneliti yang menyatakan bahwa pajak kendaraan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah diatas, ada pula hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebaliknya yaitu pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Seperti hasil yang ditemukan oleh peneliti yang berikut, oleh Joko Hariyanto (2018) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Oktari, dkk (2013) bahwa retribusi pasar tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah, sedangkan jika di uji pajak kendaraan bermotor, retribusi pasar dan jumlah penduduk secara bersama-sama ditemukan pengaruh yang positif dan signifikan. Muhammad Faris (2017) yang meneliti tentang pengaruh kontribusi PKB dan BBNKB terhadap PAD, mendapatkan hasil bahwa pengujian hipotesis yang dilakukan tentang PKB tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan BBNKB berpengaruh positif terhadap PAD.

Realisasi merupakan tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Realisasi adalah suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan (Dedi Nordiawan, 2010). Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Darwin, 2010). Dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada

daerah terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Pajak Daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Marihot, 2013).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, yaitu kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Tungka, Sabijono, 2015). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Faisal dkk (2021) bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara Penerimaan PKB terhadap PAD. Hasil penelitian lain dilakukan oleh Irene dkk (2016) bahwa Penerimaan PKB dan BBNKB merupakan kontributor terbesar pasokan keuangan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan PAD. Hasil tersebut didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurul dan Novi (2015) bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat efektif terhadap potensi PAD. Hasil uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Realisasi Penerimaan PKB berpengaruh positif terhadap Potensi PAD

Menurut Halim (2007) Intensifikasi pemungutan PKB adalah upaya meningkatkan penerimaan dengan cara mengintensifikasi kegiatan pemungutan terhadap jenis pajak yang telah ada. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengadakan pendataan objek dan subjek pajak sehingga potensi yang ada dapat direalisasikan secara optimal. Menurut Tengku Ina Fitri dalam Abdul Halim, (2008) berkaitan dengan upaya menggali potensi PAD dapat dilakukan melalui pajak dan retribusi daerah dengan kegiatan yang salah satunya adalah intensifikasi, dimana kegiatan intensifikasi ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber sumber yang telah ada, dengan memberikan kegiatan beberapa penyuluhan, sosialisasi dan penerangan. Begitu juga menurut Kamaluddin (1984) dalam Tunliyu (2010) dikatakan bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi adalah alat yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ade Rahmi (2013) bahwa Intensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap PAD. Penelitian dilakukan oleh Junaedi Siswanto (2019) dengan hasil bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD. Hasil penelitian dilakukan juga oleh Neni Nurhayati (2015) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif intensifikasi pajak dan retribusi daerah terhadap peningkatan PAD. Dari beberapa uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Intensifikasi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Ratna Natalia (2017) bahwa hasil perhitungan dengan analisis regresi menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB. Menurut penelitian Fiona Febriani BR. Marpaung (2017) dalam Said Habibi (2021), bahwa penelitian menunjukkan jumlah penduduk, jumlah kendaraan bermotor dan investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak kendaraan bermotor. Menurut penelitian Nurfitriana (2020), bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap penerimaan pajak daerah cukup besar. Perkembangan panjang jalan bisa dikatakan sangat lambat di lakukan dibandingkan dengan kendaraan bermotor yang meningkat lebih pesat, hal itu akhirnya membuat tidak seimbang yang menyebabkan padatnya arus lalu lintas, dengan adanya penambahan kendaraan bermotor setiap tahunnya menyebabkan kemacetan, memperbesar bahaya kecelakaan dan memperlambat arus lalu lintas (Samudra, 2015). Beberapa uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Jumlah kendaraan bermotor memoderasi Pengaruh Realisasi PKB terhadap Potensi PAD.

Penggunaan Moderated Regression Analysis (MRA) sebagai dasar untuk mengetahui peran suatu variabel moderasi akan dapat memperlemah atau memperkuat pengaruh variabel independen dengan variabel dependen (Suyana Utama, 2012). Penelitian yang dilakukan oleh Alisman, Irwan, Fitri (2018) terdapat bahwa intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah berkaitan erat dalam upaya menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara menurut penelitian yang dilakukan oleh Afing dan Ketut (2020) bahwa jumlah kendaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Itarini dan Wiwin Setyari (2019) tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnowo (2008) dan Rosalina (2015) bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Jumlah kendaraan bermotor memoderasi Pengaruh Intensifikasi PKB terhadap Potensi PAD.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kuantitatif yang merupakan jenis penelitian yang memiliki sifat yang khusus, terperinci dan statis dengan menganalisis data yang digunakan dengan maksud agar dapat diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi aporan Pajak Kendaraan Bermotor tahunan yang diambil dari 5 kabupaten/ kota yang ada di Kalimantan Utara, dari tahun 2017 hingga 2021 yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Squares (PLS)-Structural Equation Modelling (SEM)*. Bentuk sub-struktur, yakni sub-struktur yang menyatakan hubungan kausalitas antara variabel RPKB dan IPKB dengan variabel PPAD dan dimoderasi oleh JJKB. Berdasarkan sub-struktur yang sudah diilustrasikan pada diagram jalur model penelitian empiris, maka persamaan strukturalnya sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 Z + \beta_4 X_2 Z + e \quad (1)$$

Di mana:

Y	= PPAD
α	= Konstanta
β_1 - β_4	= Koefisien Regresi Masing-masing Variabel
X_1, X_2	= RPKB, IPKB
Z	= JJKB
e	= <i>Error Term</i>

Hasil Penelitian dan Analisis Data

Data target dan realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 menunjukkan bahwa unsur penerimaan pendapatan pajak daerah terdiri atas 5 jenis penerimaan yaitu pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Penerimaan pendapatan pajak daerah dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, di tahun 2020 mengalami penurunan dan penerimaan pendapatan pajak daerah kembali naik di tahun 2021. Dimana penerimaan pendapatan pajak daerah tertinggi terdapat

pada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, kemudian pajak kendaraan bermotor dan pajak rokok. Sementara penerimaan pajak daerah terendah adalah pajak air permukaan.

Tabel 1. Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021

Jenis Penerimaan Pajak Daerah	2017 (Milyar)	2018 (Milyar)	2019 (Milyar)	2020 (Milyar)	2021 (Milyar)
- Pajak Kendaraan Bermotor	64.35	74.49	77.59	74	77.92
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	60.63	81.11	96.25	73.82	84.3
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	147.72	196.79	204.34	151.37	181.61
- Pajak Air Permukaan	0.98	1.04	1.65	2.35	2.9
- Pajak Rokok	35.24	38.35	37,68	47.39	45.83
J u m l a h	308.92	391.78	417.51	348.93	392,56

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Kegiatan Intensifikasi yang dilakukan oleh UPT. Bapenda di 5 (lima) kabupaten/kota ini merupakan upaya untuk mencapai target yang telah ditentukan oleh masing-masing kabupaten/kota. Kegiatan intensifikasi ini periode tahun 2017-2021 dilaksanakan dengan beberapa kegiatan yaitu kegiatan penagihan *door to door* dan razia kendaraan umum. Untuk kegiatan *door to door* ini dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk dalam tim penagihan. Selain kegiatan intensifikasi secara *door to door*, petugas penagihan juga melakukan razia kendaraan umum bekerjasama dengan pihak kepolisian. Dan cara ini merupakan cara yang sangat cepat dalam mencapai target. Razia kendaraan umum ini sangat dipatuhi masyarakat, karena pihak kepolisian satuan Lalu Lintas langsung turun dalam mengecek Plat kendaraan dan STNK yang dimiliki masyarakat. Untuk itu dimana terlihat bahwa angka kegiatan intensifikasi terbanyak selama 5 tahun sejak tahun 2017-2021 di Kota Tarakan sudah dilakukan sebanyak 69 kali dengan total realisasi sebanyak Rp. 108.049.758.189,-. Untuk Kabupaten Bulungan kegiatan Intensifikasi dilakukan sebanyak 48 kali dengan total realisasi Rp. 91.778.512.050,-. Kabupaten Nunukan kegiatan intensifikasi dilakukan sebanyak 14 kali dengan total realisasi sejumlah Rp. 49.473.223.622,-, dibandingkan dengan kabupaten Malinau total kegiatan intensifikasi dilakukan sebanyak 15 kali tetapi hanya menerima realisasi sebanyak Rp. 36.485.937.176,-. Dan terakhir Kabupaten Tanah Tidung merupakan Kabupaten dengan realisasi terendah yaitu Rp. 12.455.336.959,- kegiatan intensifikasi sebanyak 12 kali.

Tabel 2. Realisasi PKB dan Kegiatan Intensifikasi 5 Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi PKB Kabupaten/Kota									
	Tarakan		Bulungan		Malinau		Nunukan		Tanah Tidung	
	Realisasi (Milyar Rp.)	Intensifikasi (kali)	Realisasi (Milyar Rp.)	Intensifikasi (kali)	Realisasi (Milyar Rp.)	Intensifikasi (kali)	Realisasi (Milyar Rp.)	Intensifikasi (kali)	Realisasi (Milyar Rp.)	Intensifikasi (kali)
2017	24	12	14,4	10	5,9	0	8,6	2	3,1	0
2018	27,2	12	17,6	10	7,2	5	9,4	5	3,2	1
2019	23,6	12	19,7	10	7,7	3	10,4	1	2,4	2
2020	16,3	16	19,1	10	7,5	3	9,9	4	2,4	3
2021	16,7	17	20,8	8	7,9	4	10,9	2	1,2	6
Total	107,8	69	91,6	48	36,2	15	49,2	14	12,3	12

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan pada tahun 2017-2021, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat dalam 5 kabupaten dan/atau kota di Provinsi Kalimantan Utara cenderung mengalami pertumbuhan yang bergerak secara fluktuatif. Di mana pada tahun 2018 jumlah kendaraan bermotor di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Malinau masing-masing mengalami peningkatan, yakni sebesar: 7.20%, 12.07%, 15.94%, dan 17.92%. Di lain sisi, Kabupaten Nunukan mengalami penurunan sebesar 0.99%. Pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan masing-masing sebesar: 5.41%, 0.12%, 0.40%, dan 4.31%. Sedangkan Kota Tarakan mengalami penurunan sebesar 9.27%. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan mengalami penurunan masing-masing sebesar: 42.37%, 2.72%, 23.41%, dan 10.17%. Kabupaten Tanah Tidung justru mengalami peningkatan sebesar 1.57%. Pada Tahun 2021 jumlah kendaraan bermotor di Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau mengalami penurunan masing-masing sebesar: 2.21%, 8.34% dan 27.04%. Adapun Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 19.75% dan 4.40%. Dengan demikian, dalam 5 (lima) periode terakhir dari 5 (lima) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara hanya Kabupaten Tanah Tidung yang konstan mengalami pertumbuhan meningkat dan 4 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara mengalami fluktuasi. Melalui pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa semakin meningkat pula jumlah wajib pajak kendaraan yang mesti dilaporkan dan terdata pada 5 UPT BAPENDA Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Utara.

Di samping itu, jumlah kendaraan bermotor yang terbanyak di Kalimantan Utara dalam 5 periode terakhir, yakni tahun 2017-2021 ialah Kota Tarakan dengan total sebesar 254,825 unit. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Bulungan dengan total jumlah kendaraan bermotor

Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan sebesar 148,405 unit. Kabupaten Nunukan memiliki total jumlah kendaraan bermotor sebesar 116,053 unit. Selanjutnya, Kabupaten Malinau dengan total jumlah kendaraan bermotor sebesar 44,973 unit. Dan terakhir ialah Kabupaten Tanah Tidung yang memiliki total jumlah kendaraan bermotor sebesar 8,453 unit sekaligus Kabupaten dengan jumlah jenis kendaraan paling sedikit di Kalimantan Utara.

Tabel 3 Jumlah kendaraan bermotor 5 Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021

Tahun	Tarakan (Unit)	Bulungan (Unit)	Tanah Tidung (Unit)	Malinau (Unit)	Nunukan (Unit)
2017	61,355	26,765	1,430	9,120	23,592
2018	65,774	30,264	1,658	10,754	23,358
2019	59,676	31,901	1,660	10,797	24,365
2020	34,390	31,032	1,686	8,269	21,888
2021	33,630	28,443	2,019	6,033	22,850
Total	254,825	148,405	8,453	44,973	116,053

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Berdasarkan dari tabel 3 data pendapatan asli daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021 menunjukkan tingkat pertumbuhan yang bergerak secara fluktuatif. Dengan data tahun 2018 Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, dan Kabupaten Malinau akan peningkatan pendapatan asli daerah masing-masing sebesar 21.79%, 13.80%, 1.09%, dan 40.41%. Dan Kabupaten Nunukan pendapatan asli daerahnya mengalami penurunan sebesar 12.00%. Pada tahun 2019, pendapatan asli daerah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4.49%, 18.64%, 14.08%, dan 15.18%. Dengan Kabupaten Tanah tidung mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebesar 21.91%. Pada tahun 2020, pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Tanah Tidung dan Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 2.41% dan 10.50%. Adapun pendapatan asli daerah pemerintah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Malinau mengalami penurunan masing-masing sebesar 32.01%, 2.71% dan 8.53%. Pada tahun 2021, pendapatan asli daerah pemerintah Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan mengalami peningkatan masing-masing sebesar 7.115%, 5.88%, 13.78%, dan 10.71%. Sedangkan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Tanah tidung mengalami penurunan signifikan sebesar 50.42%.

Adapun jumlah pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang disajikan pada tabel 4, menunjukkan dalam 5 periode terakhir senilai Rp649,36 M. Dengan Kota Tarakan memberikan sumbangsih terbesar di antara 5 Kabupaten/Kota di Kalimantan Utara, yaitu sejumlah Rp262,49 M. Kemudian, disusul oleh Kabupaten Bulungan dengan jumlah pendapatan asli daerah dalam 5 periode terakhir adalah Rp224,35 M. Kabupaten Malinau memiliki pendapatan asli daerah senilai Rp82,52 M. Jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Nunukan adalah senilai Rp65,67 M. Dan terakhir, pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten Tanah tidung berjumlah Rp14,33 M.

Tabel 4 Pendapatan Asli Daerah 5 Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2021

Tahun	Tarakan (Milyar Rp.)	Bulungan (Milyar Rp.)	Tanah Tidung (Milyar Rp.)	Malinau (Milyar Rp.)	Nunukan (Milyar Rp.)
2017	49.69	36.23	3.58	11.56	12.50
2018	60.51	41.23	3.61	16.23	11.00
2019	63.23	48.92	2.82	18.52	12.67
2020	42.99	47.59	2.89	16.94	14.00
2021	46.07	50.39	1.43	19.27	15.50
Total	262.49	224.35	14.33	82.52	65.67

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Analisis korelasi antar variabel menunjukkan koefisien korelasi antar variabel dan signifikansinya (*P-value*). Tabel 5 menunjukkan hasil korelasi matrik dari seluruh konstruk penelitian.

Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan
Tabel 5 Data Korelasi

	RPKB	IPKB	JJKB	PPAD
Korelasi				
RPKB	1	0.55	0.826	0.831
IPKB	0.55	1	0.401	0.646
JJKB	0.826	0.401	1	0.543
PPAD	0.831	0.646	0.543	1
P-value				
RPKB	1	<0.001	<0.001	<0.001
IPKB	<0.001	1	0.002	<0.001
JJKB	<0.001	0.002	1	<0.001
PPAD	<0.001	<0.001	<0.001	1

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa RPKB berkorelasi positif dengan IPKB, JJKB, PPAD (signifikan pada level 0.01). IPKB berkorelasi positif dengan JJKB dan PPAD (signifikan pada level 0.01). JJKB berkorelasi positif dengan PPAD (signifikan pada level 0.01).

Tabel 6 *Goodness of Fit Inner Model*

Kriteria	Nilai	Rule of Thumb	Simpulan
<i>Average Path Coefficient (APC)</i>	0.256, P = 0.010	Acceptable P < 0.05	Diterima
<i>Average R-squared (ARS)</i>	0.781, P < 0.001	Acceptable P < 0.05	Diterima
<i>Average Adjusted R-squared (AARS)</i>	0.763, P < 0.001	Acceptable P < 0.05	Diterima
<i>Average Block VIF (AVIF)</i>	2.003	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Diterima
<i>Average Full Collinearity VIF (AFVIF)</i>	4.257	Acceptable if ≤ 5 , ideally ≤ 3.3	Diterima
<i>Tenenhaus GoF (GoF)</i>	0.884	≥ 0.1 (small), ≥ 0.25 (medium) dan ≥ 0.36 (large)	Diterima

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Model penelitian ini adalah baik, di mana P-value untuk APC, ARS dan AARS < 0.05 dengan nilai APC = 0.256, nilai ARS = 0.781 dan nilai AARS = 0.763. Begitu juga dengan nilai AVIF = 2.003 (≤ 3.3) dan nilai AFVIF = 4.257 (≤ 5), berarti bebas multikolinieritas antar variabel eksogen. Hasil GoF ialah 0.884 (≥ 0.36), berarti kekuatan prediksi model kuat dan dipertimbangkan untuk diterima. Secara menyeluruh hasil uji *Goodness of Fit* pada penelitian ini baik, berarti evaluasi model fit sesuai atau didukung oleh data.

Tabel 7 Uji *Effect Size*

Description Path	Effect Size
RPKB → PPAD	0.575
IPKB → PPAD	0.056
JJKB*RPKB → PPAD	0.016
JJKB*IPKB → PPAD	0.134

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

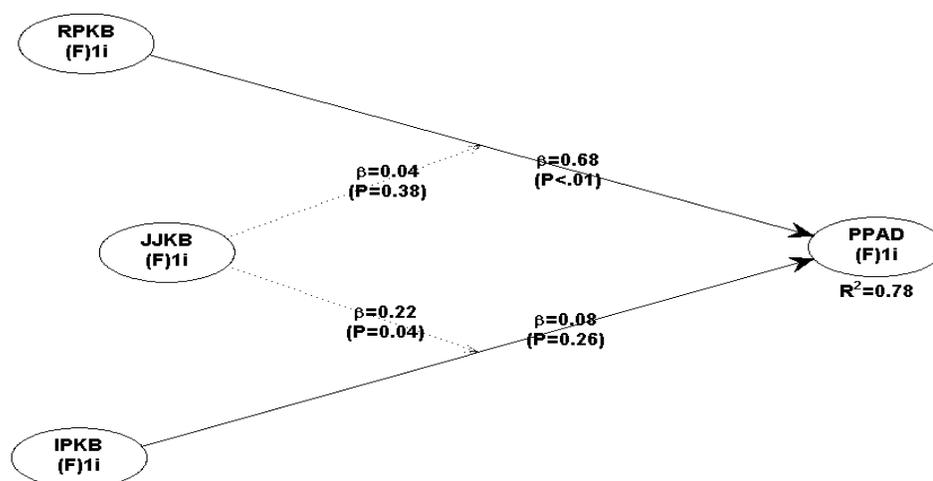
Berdasarkan Tabel 7 untuk nilai *effect size* variabel JJKB yang memoderasi IPKB terhadap PPAD senilai 0.134 (< 0.15), berarti *effect size* dalam kategori lemah. Sedangkan, *effect size* yang diperoleh variabel RPKB terhadap PPAD sebesar 0.575 (≥ 0.35), berarti *effect size* dalam kategori kuat. Kemudian, IPKB dan JJKB yang memoderasi RPKB mempunyai nilai *effect size* terhadap PPAD masing-masing senilai 0.056 dan 0.016 (< 0.02), berarti tidak punya *effect size*. Hal ini menandakan pengaruh IPKB terhadap PPAD dan JJKB memoderasi RPKB terhadap PPAD sangat lemah dari pandangan praktis meski nilainya signifikan.

Tabel 8 Uji Signifikansi Pengaruh antar Variabel

Description Path	Path Coefisients	P-value
RPKB → PPAD	0.681	< 0.001
IPKB → PPAD	0.084	0.261
JJKB*RPKB → PPAD	0.042	0.377
JJKB*IPKB → PPAD	0.217	0.043

Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Hasil estimasi signifikansi hubungan antar variabel dapat juga ditunjukkan pada gambar diagram jalur model berikut.



Sumber : Data Sekunder diolah (2023)

Diketahui bahwa hubungan antar variabel yang berpengaruh positif signifikan antara lain: RPKB terhadap PPAD dan JJKB yang memoderasi IPKB terhadap PPAD. Adapun hubungan antar variabel yang berpengaruh positif tidak signifikan antara lain: IPKB terhadap PPAD dan JJKB yang memoderasi RPKB terhadap PPAD.

a. Pengaruh Realisasi Penerimaan PKB terhadap Potensi PAD

Hipotesis 1 menyatakan bahwa “Realisasi Penerimaan PKB berpengaruh positif terhadap Potensi PAD.” Berdasarkan hasil analisis pengaruh Realisasi Penerimaan PKB terhadap Potensi PAD didapatkan nilai *path* koefisien yang positif dan signifikan ($P\text{-value} < 0.01$), hasil ini mendukung dan menerima hipotesis. Hasil penelitian telah membuktikan dan mendukung penelitian Faisal dkk (2021) dan Nurul dan Novi (2015) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor sangat efektif terhadap potensi PAD. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa semakin tinggi realisasi penerimaan PKB maka penerimaan PAD yang diperoleh juga semakin besar karena penerimaan PKB dan BBNKB merupakan kontributor terbesar pasokan keuangan bagi pemerintah daerah melalui penerimaan PAD (Irene dkk (2016). Peningkatan atas realisasi penerimaan PKB disebabkan oleh kesadaran masyarakat untuk rutin membayar pajak kendaraan bermotor tiap tahunnya, yang kemudian peningkatan ini diikuti oleh penerimaan PAD yang juga semakin meningkat. Dengan demikian, realisasi penerimaan PKB akan meningkat apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran yang tinggi untuk rutin membayar pajak kendaraan bermotor maka semakin besar pula penerimaan PAD.

b. Pengaruh Intensifikasi PKB terhadap Potensi PAD

Hipotesis 2 menyatakan bahwa “Intensifikasi PKB berpengaruh positif terhadap Potensi PAD.” Berdasarkan hasil analisis pengaruh Intensifikasi PKB terhadap Potensi PAD didapatkan nilai *path* koefisien yang positif dan tidak signifikan, hasil ini tidak mendukung dan menolak hipotesis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Della Fudhilatunisa dkk (2023) bahwa intensifikasi pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak memiliki autokorelasi positif dan bahwa hipotesis di tolak, dimana intensifikasi tidak berpengaruh terhadap PAD. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudianti (2014) bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan intensifikasi

pajak terhadap PAD. Sedangkan hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Ade Rahmi (2013), Neni Nurhayati (2015) dan Junaedi Siswanto (2019) yang menyatakan bahwa Intensifikasi berpengaruh signifikan positif terhadap PAD. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya tingkat intensifikasi pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak memberikan pengaruh signifikan atas peningkatan pendapatan asli daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya efektivitas dari intensitas yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat sehingga usaha pemerintah dalam meningkatkan PAD melalui intensifikasi PKB tidak berdampak sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian, tinggi rendahnya pendekatan intensifikasi PKB yang dilakukan oleh pemerintah tidak mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat penerimaan PAD jika pendekatannya dirasa kurang tepat dan tidak efektif.

c. Pengaruh Jumlah kendaraan bermotor Memoderasi Pengaruh Realisasi PKB terhadap Potensi PAD

Hipotesis 3 menyatakan bahwa “Jumlah Jenis Kendaraan Bermotor memoderasi Pengaruh Realisasi PKB terhadap Potensi PAD.” Berdasarkan hasil analisis pengaruh Jumlah Jenis KB memoderasi Pengaruh Realisasi PKB terhadap Potensi PAD didapatkan nilai *path* koefisien yang positif dan tidak signifikan, hasil ini tidak mendukung dan menolak hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Jenis KB tidak mampu memoderasi Pengaruh Realisasi PKB terhadap PAD. Dengan demikian, semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor tidak memengaruhi tingkat realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian atas data yang dilaporkan dan tercatat, karena umumnya peningkatan jumlah kendaraan bermotor mestinya diikuti oleh peningkatan atas penerimaan pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah kendaraan bermotor tidak mampu memperkuat pengaruh realisasi penerimaan PKB terhadap peningkatan potensi PAD yang akan diterima. Hasil penelitian ini dilakukan untuk semua variable bebas dari Jumlah Jenis KB. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna Natalia (2015) bahwa jika dilihat dari beberapa variable bebasnya terdapat pengaruh signifikan dan tidak signifikan, semua variable bebas jenis-jenis kendaraan seperti sepeda motor, mobil penumpang, mobil bis dan mobil barang,

Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PKB. Hasil uji statistic secara parsial, sepeda motor dan mobil penumpang berpengaruh positif dan signifikan, mobil barang positif namun tidak signifikan, mobil bis berpengaruh negative dan signifikan.

d. Pengaruh Jumlah kendaraan bermotor memoderasi pengaruh Intensifikasi PKB terhadap Potensi PAD

Hipotesis 4 menyatakan bahwa “Jumlah Jenis KB memoderasi Pengaruh Intensifikasi PKB terhadap Potensi PAD.” Berdasarkan hasil analisis pengaruh Jumlah Jenis KB memoderasi Pengaruh Intensifikasi PKB terhadap Potensi PAD didapatkan nilai *path* koefisien yang positif dan signifikan ($P\text{-value} < 0.05$), hasil ini mendukung dan menerima hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Jumlah Jenis KB mampu memoderasi Pengaruh Intensifikasi PKB terhadap PAD. Semakin tinggi jumlah kendaraan bermotor akan memengaruhi tingkat intensifikasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Meningkatnya Jumlah Jenis KB akan memengaruhi tingkat intensifikasi pajak kendaraan bermotor yang dilakukan sehingga potensi pendapatan asli daerah akan terdorong untuk mengalami peningkatan. Dengan demikian, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor akan memperkuat pengaruh intensifikasi pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Afing dan Ketut (2020) bahwa jumlah kendaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Itarini dan Wiwin Setyari (2019) tersebut menunjukkan bahwa jumlah kendaraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap retribusi daerah. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratnowo (2008) dan Rosalina (2015) bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel jumlah kendaraan terhadap retribusi daerah.

Penutup

Berdasarkan analisis dan pengujian yang dilakukan, maka bisa disimpulkan sebagai berikut: (1) Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Artinya, semakin tinggi realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor maka akan meningkatkan potensi pendapatan asli daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. (2) Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak berpengaruh terhadap Potensi Pendapatan Asli

Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Artinya, semakin tinggi atau rendah tingkat intensifikasi pajak kendaraan bermotor tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan atau penurunan potensi pendapatan asli daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. (3) Jumlah kendaraan bermotor tidak mampu memoderasi pengaruh Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Artinya, naik atau turunnya jumlah kendaraan bermotor tidak memengaruhi kuat atau lemahnya pengaruh realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap potensi pendapatan asli daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. (4) Jumlah kendaraan bermotor mampu memoderasi pengaruh Intensifikasi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara. Artinya, meningkatnya jumlah kendaraan bermotor mampu memperkuat pengaruh intensifikasi pajak kendaraan bermotor terhadap potensi pendapatan asli daerah di BAPENDA Provinsi Kalimantan Utara.

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82) Kondisi kerja yang baik adalah ketika manusia dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal sehat, aman dan nyaman (Pandu Widodo, Hesti et al 2024:73)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2007). Akutansi Keuangan Daerah. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Ahmad, M. d. (2000). Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Altius, H. Y. (2012). Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap PAD dan Dampaknya bagi Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera USU.
- Anjani, F. (2014). Pengaruh Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung). Bandung.
- Dea Oktari, Y. J. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat.
- Dharma, G. P. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.1.
- Elvina, D. (2017). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Faisal Aulia Akbar Ahmad, A. F. (2021). Influence of Motor Vehicle Tax to the Local Revenue of West Java Province in Bandung City. Tinjauan Pendidikan Geografis International.
- Halim, A. (2004). Akademi Manajemen Perusahaan, YKPN. Yogyakarta. Manajemen Keuangan Daerah.
- Halim, A. (2017). Manajemen Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, edisi Kedua.
- Halim, A., & Jamal A. Nasir. (2006). Kajian tentang Keuangan Daerah Pemerintah Malang. Jurnal Manajemen Usahawan. No. 06 Tahun XXXV Juni 2006
- Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, 4(2), 147–165. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>
- Haryanto, J. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan, 4(2), 147–165. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>
- Kusniawan, M. (2005). Upayakan Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Asli Daerah Melalui Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah. Jurnal Ilmu Administrasi. Vol.2 No.1.
- Latan, H., & Ghozali, I. (2015). Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris (2nd ed.). Universitas Diponegoro.
- Majdi, U. Y. (2007). Quranic Quotient. Jakarta: Qultum Media.
- Mangkoesebroto, G. (1997). Ekonomi Publik. Yogyakarta : BPF.

- Mardiasmo. (2002). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mariyanto, J. (2015). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Akutansi dan Sistem Teknologi*, 11(33), 2015, 58-63.
- Muhammad Faris, Y. (2018). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padang. *Jurnal Fakultas Ekonomi*.
- Nasir, A. H. (2006). *Majalah Manajemen Usahawan Indonesia*. Kajian Tentang Keuangan Daerah Pemerintah Malang , Nomor 06/Tahun XXXV.
- Natalia, R. (2017). Pengaruh Jumlah dan Jenis Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan PAD Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmiah*.
- Natalia, R. (2017). Pengaruh Jumlah dan Jenis Kendaraan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Kalimantan Barat. *Artikel Ilmiah*.
- Nora Januarti Panjaitan, H. M. (2017). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal EK dan BI*.
- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurhasanah, H. L. (2020). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number Of Tourists On Locally - Generated Revenue at Bintan Districts. *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*.
- Nurfitriana, A. S. (2020). Realization Analysis Of Received Motor Vehicle Tax And Behavior Of Motor Vehicle Name In The Regional Income Agency Of Central Sulawesi Province. *Economy Deposit Journal Volume 2 No. 1*.
- Nurul Aliah, A. H. (2019). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Terhadap PAD ACEH. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik Indonesia*, Volume 6 Nomor 1.
- Orbaningsih, D. (2010). Penggalan Potensi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Malang. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 1-12.
- Pajak, D. J. (2001). Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001*.
- Haryanti, S. S., & Wijaya, K. A. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ProBank: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 4(2), 147–165. <https://doi.org/10.36587/probank.v4i2.507>
- Raharjo, T. P., & Bieattant, L. (2018). Influence Oftaxpayer Formal Knowledge and Tax Awareness Against Compliance of Tax Motor Vehicles (Car Taxpayer Case Study in Samsat Polda Jakarta Selatan). *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).

- Ekonomika45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan
- Rakatitha, P. N. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali Periode 2013-2016. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana .
- Saleh, S. (2003). Kemampuan Pinjam Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia. Media Ekonomi dan Bisnis : Semarang, Vol. XIV No. 2 Desember 2003.
- Sentoro. (2003). Analisa Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Provinsi Jawa Timur.
- Setyani Sri Haryanti, K. A. (2019). Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Layanan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ekonomi dan Perbankan, Vol, No. 2.
- Sholihin, M., & Ratmono, D. (2021). Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis (C. Mitak (ed.); 2nd ed.). ANDI.
- Soesantro, Hadi. (2005). Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Jakarta: Kanisius
- Suandy, E. (2002). Perpajakan: Dilengkapi Dengan Latihan Soal. Salemba Empat. Jakarta.
- Sukardi, A. (1999). Analisis Penerimaan PKB dalam rangka Optimalisasi PAD di Provinsi Jawa Timur. Tesis Magister Manajemen Universitas Airlangga Surabaya.
- Suparno. (2010). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketenagakerjaan di Indonesia. Tesis S2 Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Suparno. (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta, Andi.
- Tambunan, S. B. (2016). Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Sumatera Utara. Vol. 2, No. 1.
- Tyas Pambudi Raharjo, L. B. (2018). Pengaruh Pengetahuan Formal Oftaxpayer dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Informasi Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik Indonesia.
- Utomo, M. N. (2018). Strategi Meningkatkan Nilai Perusahaan Melalui Efisiensi Operasional Berkomitmen Ramah Lingkungan (Studi Empirik pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa Efek Indonesia). Universitas Diponegoro.
- Widhiyanti, L. (2018). Pengaruh Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung Periode Tahun 2012-2017.
- Windani, S. S. (2022). Peran Profitabilitas, Utang dan Financial Distress dalam Meningkatkan Nilai Perusahaan dengan Suku Bunga sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. Universitas Borneo Tarakan.

- Aziz Sholeh, Abdul et. Al. 2024. Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya, *Journal Of Management and Creative Business* Vol. 2 No. 1 Januari 2024, Halaman : 82 - 96
- Pandu Widodo, Hesti et. al. 2024. Dampak Pelatihan, Motivasi dan Lingkungan Kerja pada Kinerja Karyawan PT. KAI (Persero) di Stasiun Surabaya Pasar Turi, *Journal Of Management and Creative Business* 2 (1) , 66 - 81

DOKUMEN-DOKUMEN

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara No. 53 Tahun 2017, Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat menjadi PKB, merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan atas kendaraan bermotor.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain.